

BAB V

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

Perkembangan pemerintahan di Nepal ditentukan oleh perkembangan masyarakatnya yang disebabkan oleh faktor-faktor lain yang melandasinya seperti pertambahan dan tekanan penduduk, ancaman atau perang dan penjarahan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang lain dan telah menjadi faktor-faktor yang memacu perkembangan pemerintahan yaitu penguasaan oleh suatu pemerintah atau Negara.

Perubahan bentuk dari pemerintahan monarkhi absolute telah membawa bangsa Nepal menjadi terpuruk, kekuasaan raja tidak dapat dikontrol, sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan. Bagaimanapun juga rakyat Nepal yang menjadi korban kekuasaan raja. Pada masa Pemerintahan raja Gyanendra, rakyat sudah tidak tahan dengan situasi yang ada.

Kelompok pemberontak Maoist berusaha melakukan perlawanan, gerakan ini sebelumnya adalah gerakan bawah tanah. Namun pada perkembangannya gerakan ini menjadi gerakan perlawanan yang radikal sebagai bentuk perlawanan terhadap kerajaan yang absolute. Gerakan ini pada akhirnya dapat menekan raja untuk melakukan perubahan bentuk pemerintahan menjadi monarkhi konstitusional.

Hingga 1990, Nepal adalah sebuah monarki absolut berjalan di bawah kontrol eksekutif dari Raja. Raja Birendra pada tahun 1990 sepakat untuk mereformasi politik

dengan menciptakan monarki konstitusional dengan Raja sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Parlemen Nepal berbentuk bilameral yang terdiri dari DPR dan Dewan Nasional. DPR terdiri dari 205 anggota yang dipilih langsung oleh rakyat. Dewan Nasional memiliki 60 anggota, 10 dicalonkan oleh Raja, 35 dipilih oleh DPR dan sisanya 15 dipilih oleh suatu pemilihan perguruan tinggi yang terdiri dari kursi dari desa dan kota. Ketika parlemen baru berumur lima tahun, parlemen tadi dibubarkan oleh Raja.

Setelah terjadi perubahan dari Monarkhi Absolut ke Monarkhi konstitusional, kondisi Nepal masih terjadi ketidakpuasan. Banyak partai politik saling bertikai. Disamping itu raja masih turut campur dalam penentuan kursi dengan menunjuk anggota yang dipilihnya atau ditunjuk secara langsung oleh raja. Kondisi ini akhirnya tidak bertahan lama karena situasi semakin kacau dan kelompok maoist kembali melakukan perlawanan dengan tuntutan merubah kembali bentuk pemerintahan. Akhirnya raja memutuskan akan menyelenggarakan pemilu yang demokratis.

Pada bulan Februari 1996, Partai Komunis Nepal (Maoist) melakukan pemberontakan di lebih dari 50% propinsi dan 75% distrik. Sekitar 11.000 polisi, dan masyarakat sipil telah terbunuh sejak konflik tahun 1996. Pada bulan Juli 2001 Perdana Menteri Deuba mengumumkan gencatan senjata, dimana Maoist berjanji untuk mematuhi, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mencari solusi negosiasi untuk menyelesaikan konflik.

Para gerilyawan Maois di Nepal tidak lagi harus berperang secara fisik melawan kerajaan dan partai-partai politik mapan. Karena mereka sudah

memenangkan pemilihan umum yang demokratis. Pejuang bawah tanah yang sejak lama bertempur, secara mengejutkan menjadi fraksi terkuat di dewan konstituante, walau pun mereka sebenarnya tidak meraih suara mayoritas mutlak dalam pemilihan umum.

Nepal yang telah berumur 239 tahun dalam bentuk monarkhi kini berubah menjadi Republik Federal. Parlemen hasil Pemilu April 2008 lalu yang mengakomodasi 220 kursi dari sayap kiri Maoist dari total 601 kursi berhasil mengubah undang-undang yang mengubah institusi kerajaan menjadi bentuk Republik. Dengan penegasan itu, parlemen mendesak penguasa kerajaan yang masih bertahan, Raja Gyanendra untuk segera mengosongkan istana Merah Muda di Kathamandu. Perubahan Negara Monarki menjadi Republik itu disambut sebagian warga Nepal dengan suka cita. Kenyataannya tak dapat dipungkiri bila kelompok pemberontak Maoist, sebagai organisasi perlawanan, itu kini sudah masuk ke wilayah pengambil keputusan. Sebagian rakyat Nepal, dari 26 juta orang, tersebut telah memberikan kepercayaan pada wakil-wakil mereka yang tergabung dalam partai Maoist. Perubahan negara monarki ke republik pun mendapat warganya. Pemilihan Presiden Nepal digulirkan hanya dua bulan setelah parlemen menetapkan Nepal sebagai republik. Hal ini diputuskan guna menghindari krisis politik yang lebih jauh. Nepal sebelumnya merupakan Negara Monarki, perubahan yang terjadi diiringi protes massal dan krisis politik. Tidak seperti rencana semula, yakni menunjuk satu kandidat Presiden saja, ketiga partai terbesar akhirnya mengajukan pilihannya masing-masing.